

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	xii
<i>ABSTARCT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	13
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	13
2. Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	13
3. Peralihan Hak Atas Tanah.....	14
B. Tinjauan Umum Hak Pakai Atas Tanah.....	17
1. Pengertian Hak Pakai.....	17
2. Peruntukan Hak Pakai.....	18

3. Cara Terjadinya Hak Pakai	18
4. Hak Pemegang Hak Pakai.....	19
5. Subyek Hak Pakai	19
6. Peralihan Hak Pakai.....	20
C. Tinjauan Tentang Tanah Negara dan Peralihannya	20
1. Pengertian Tanah Negara	20
2. Macam-macam Tanah Negara.....	21
3. Peralihan Hak Pakai Atas Tanah Negara.....	21
D. Tinjauan Umum Jual Beli Tanah	23
1. Pengertian Transaksi Tanah	23
2. Peraturan Transaksi Tanah.....	24
3. Transaksi Tanah Menurut Hukum Adat	24
4. Syarat Jual Beli Tanah	25
E. Pendaftaran Tanah.....	27
F. Tinjauan Umum Tentang Balik Nama Sertifikat Tanah	29
G. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	30
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	31
2. Tugas PPAT.....	32
3. Kewenangan PPAT	33
4. Kewajiban PPAT.....	35
5. Akta PPAT.....	37
H. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum	43

2. Sarana Perlindungan Hukum	44
3. Unsur Perlindungan Hukum	44
4. Tinjauan dan Manfaat Perlindungan Hukum	45
I. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Bahan Penelitian	48
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peralihan Hak Pakai Atas Tanah Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55
1. Peraturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria	55
2. Peraturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria	57
3. Peraturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	59
4. Peralihan hak pakai atas tanah negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (studi kasus AJB Nomor 71/2018)	63

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli terhadap Jual beli Hak Pakai Atas Tanah Negara Yang Sertifikatnya Belum Bisa Balik Nama (Studi Kasus AJB Nomor 71/2018) di Kabupaten Sleman.....	65
1. Keabsahan perjanjian jual beli tanah para pihak	65
2. Keabsahan akta jual beli nomor 71/2018	67
3. Perlindungan preventif sebagai bentuk pencegahan.....	69
4. Perlindungan represif sebagai bentuk penyelesaian jual beli hak pakai atas tanah yang sertifikatnya belum bisa balik nama	71
C. Pertanggungjawaban PPAT yang Telah Menerbitkan Akta Jual Beli Hak Pakai Atas Tanah Negara yang Sertifikatnya Belum Bisa Balik Nama	70
1. Tanggung jawab PPAT terhadap akta yang mengandung cacat hukum	75
2. Pertanggung jawaban PPAT yang telah menerbitkan akta jual beli yang sertifikatnya belum bisa balik nama (studi kasus AJB Nomor 71/2018)	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku.....	93

B. Jurnal/Tesis	96
C. Peraturan Perundang-undangan	97
D. Internet	98